

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semenjak Indonesia merdeka melalui perjuangan penuh dengan patriotisme, Indonesia berusaha membangun perekonomiannya sendiri dengan semangat nasionalisme. Dalam suatu negara perekonomian dikatakan berhasil apabila masyarakatnya menikmati hidup yang sejahtera sebagai dampak positif dari kegiatan perekonomiannya. Untuk mencapai tujuan keberhasilan ekonomi maka pembangunan ekonomi suatu negara harus diperhatikan perkembangannya. Terjadinya kemajuan dalam pembangunan ekonomi salah satunya ialah terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang di capai oleh negara tersebut.

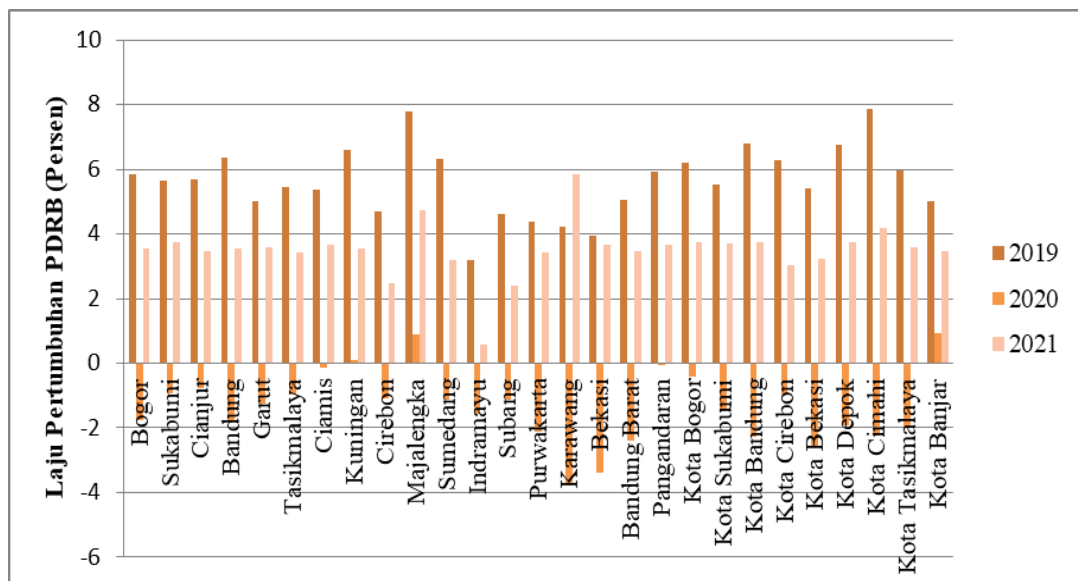
Menurut Todaro (2000) pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Menurut Todaro (2000) ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu (1) Makanan (*sustenance*), artinya segala sesuatu yang tidak hanya digunakan untuk mengganjal perut, tetapi juga mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, (2) Jati diri (*self-esteem*), artinya adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa pantas dan layak untuk melakukan atau mengejar sesuatu, dan lain-lain. (3) Kebebasan (*freedom*), artinya kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek

materiil dalam kehidupan ini (Suindyah, 2021).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi secara nasional yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang berlaku. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat membangun perekonomian daerahnya yang tidak hanya di tingkat perkotaan saja, akan tetapi juga meliputi pembangunan di kabupaten, kecamatan dan desa. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada didasarkan pada tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan pertumbuhan *output* yang terbentuk dari pertumbuhan berbagai sektor perekonomian di suatu daerah yang mengalami perubahan sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu periode waktu tertentu. (Hasanah, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan biasanya diartikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Tingginya nilai PDB bisa diartikan bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut baik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari 34 provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing untuk membangun wilayah dan perekonomian di daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi-Provinsi Indonesia yang memiliki PDRB menurut Atas Dasar Harga Konstan tertinggi pada tahun 2017 adalah Provinsi

DKI Jakarta, sedangkan Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki PDRB tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Pulau Kalimantan diduduki oleh Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Bali dan Nusa Tenggara diduduki oleh Provinsi Bali, serta di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua di duduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa maka perlu diketahui pemerataannya. Salah satu Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat kondisi PDRB di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2022

**Gambar 1.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Berdasarkan pada Gambar 1.1 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada semua sektor terutama pada perekonomian. Oleh karena itu, laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2020

mengalami penurunan. PDRB Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke tiga setelah Provinsi Jawa Timur, padahal Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang secara geografis lebih dekat dengan Ibu Kota Negara serta memiliki sumber daya melimpah, banyaknya bangunan industri, dan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 sebesar 48.220.094 jiwa (Kementrian Dalam Negeri). Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Barat.

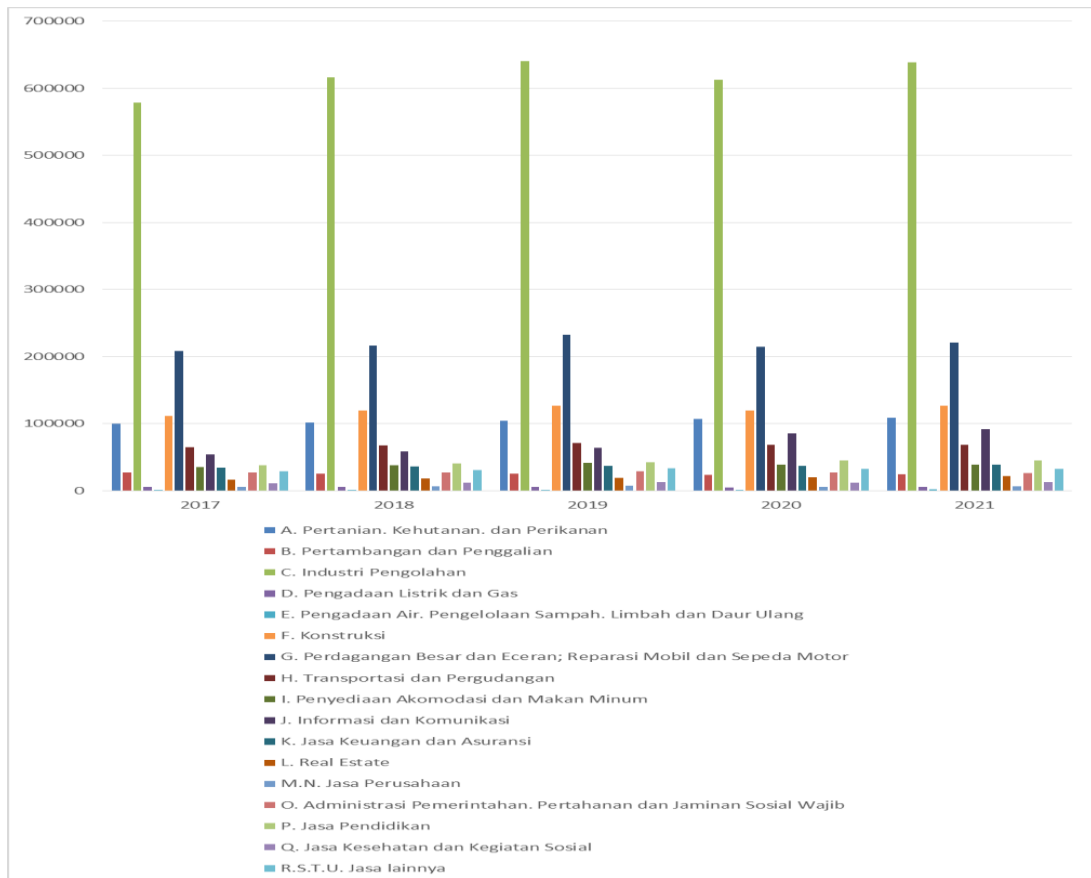
Pendapat yang dikemukakan Jhingan (2002) tentang perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural yang dikemukakan Jhingan (2002) tersebut akan menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan struktural tersebut industri di harapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya (Suindyah, 2021).

Pada dasarnya pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan masyarakat, bukan suatu kegiatan mandiri yang hanya sekedar mencapai kondisi fisik saja. Adanya industrialisasi atau pembangunan industri di suatu wilayah, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan artian akan mengubah tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Oleh karena itu, dengan adanya industri akan mendorong meningkatnya nilai PDRB yang kemudian akan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Ketika

masyarakat sejahtera maka akan menaikkan kualitas sumber daya seperti tingginya tingkat pendidikan dan berkurangnya pengangguran serta akan menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah. Pergeseran sektor dari sektor primer ke sektor non primer merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri.

Dibandingkan provinsi lain, Provinsi Jawa Barat menjadi pusat industri nasional, bahkan Provinsi Jawa Barat disebut sebagai jantung industri nasional karena mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2014 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, 40 diantaranya berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Dari 31.000 hektare (ha) luas industri di Indonesia sekitar 23.000 hektare (ha) berada di Jawa Barat. Selain itu, Jawa Barat disebut jantung industri nasional karena Provinsi Jawa Barat mengendalikan lebih dari 50 persen kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan di tahun 2017 sebanyak 2.381,97 hektare (ha) di wilayah Utara Provinsi Jawa Barat dikembangkan 10 kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional. Dari jumlah keseluruhan sekitar 35 persen atau 851,97 hektar (ha) berada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, kinerja industri Provinsi Jawa Barat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Industri manufaktur di Jawa Barat mempunyai peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga kostan di Jawa Barat, sumbangan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan seperti terlihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Sumber: BPS 2022

**Gambar 1.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**  
**(Milyar Rupiah)**

Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, sektor industri memberikan peran yang besar terhadap pertumbuhan PDRB yaitu mencapai sebesar 638.689,20 milyar rupiah pada tahun 2021 dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa sektor industri mampu menopang dan memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada sektor industri ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga sumbangsinya terhadap pertumbuhan PDRB dapat maksimal.

Aktivitas perekonomian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai fasilitas dan kemudahan. Wilayah industri cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota, karena industri memusat di wilayah yang mempunyai potensi dan kemampuan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Di samping itu, pengelompokan kegiatan industri terjadi karena setiap industri bisa mendapat manfaat dari kedekatan lokasi berbagai perusahaan industri. Apabila aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut mengelompok atau memusat karena dorongan berbagai faktor seperti kedekatan sumber daya, maka akan membentuk apa yang dinamakan dengan aglomerasi ekonomi. Markusen (dalam Kuncoro, 2012: 19) menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang berdekatan letaknya dengan perusahaan lain serta penyediaan jasa-jasa (Agustin, 2019).

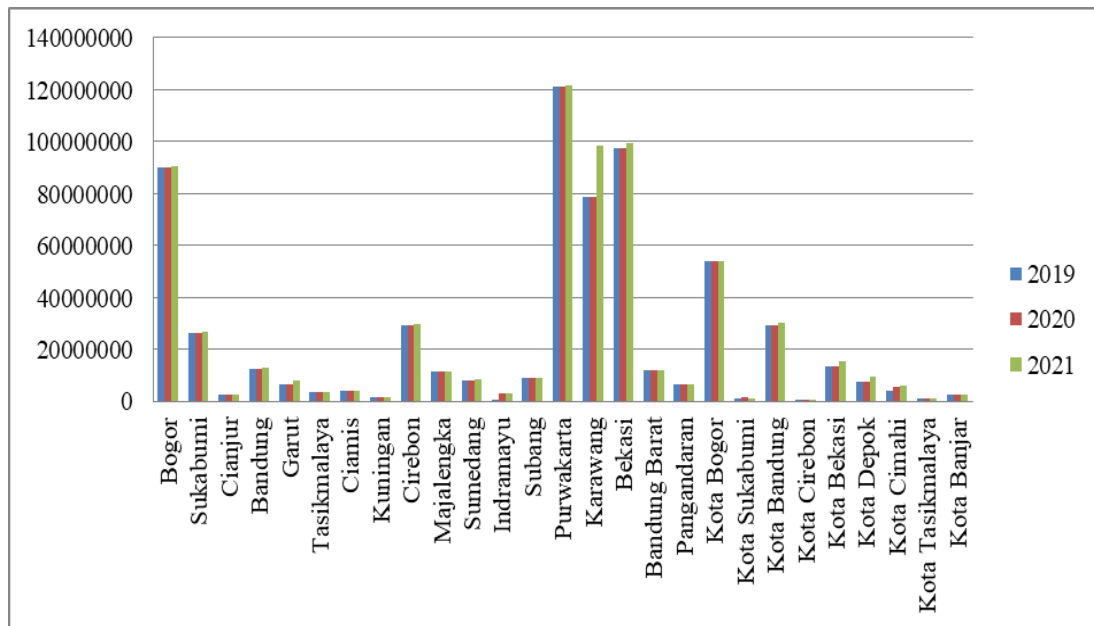
L. E. Nainggolan (2021) menyatakan bahwa hal terpenting dari penggunaan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah pola pemusatan, dimana kumpulan berbagai jenis industri pada suatu tempat tertentu, akan mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal, dalam hal ini adalah penghematan aglomerasi. Hal ini dapat menciptakan aglomerasi yang membawa pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Agustin, 2019).

Aglomerasi merupakan pengelompokan industri di satu lokasi. Aglomerasi di Indonesia diadopsi dalam bentuk zona industri, yaitu suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi kegiatan industri. Di zona ini berdiri

industri individual (industri yang berdiri sendiri) dan industri yang mengelompok dalam kawasan industri (*industrial estate*). Konsep aglomerasi dalam konteks ekonomi geografi yang berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Montgomery (Kuncoro M. , 2002) bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. Tujuan dasar dari aglomerasi atau teori konsentrik yaitu untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok usaha, sehingga dalam lokasi tersebut diharapkan mampu menarik sekaligus memunculkan usaha-usaha lain. Akan tetapi, aglomerasi industri cenderung menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan antar wilayah. Ini terjadi karena, wilayah yang banyak mempunyai industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan (Kusumasari & Kartiasih, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi PDRB yaitu investasi. Industri merupakan salah satu sektor utama yang menyerap banyak investor domestik maupun manca negara. Menurut Harrod dan Domar investasi merupakan pengeluaran yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka investasi akan menambah jumlah barang modal di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa sisi pengeluaran keuangan publik merupakan hal yang sangat penting, karena pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting terhadap aktivitas ekonomi. Semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, maka semakin baik akibatnya bagi perekonomian.





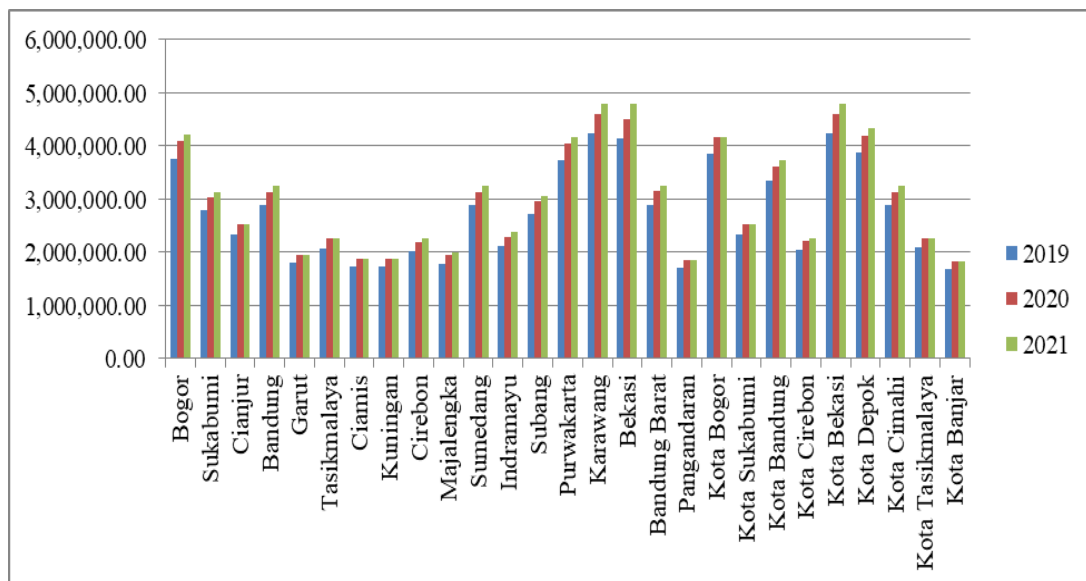
Sumber: *Open Data Jawa Barat 2022*

**Gambar 1.3**  
**Investasi Pada Unit Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan pada Gambar 1.3 investasi pada unit industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021 selalu meningkat setiap tahunnya, walaupun kenaikan tersebut tidak cukup tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan paska Pandemi Covid-19. Nilai investasi di sektor industri juga berbeda disetiap daerah dikarenakan terdapat perbedaan sumber daya di masing-masing daerah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya sumber daya yang terdapat di daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan banyaknya investasi yang ada maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi PDRB yaitu upah minimum. Todaro dan Smith (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan upah minimum bagi para pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang kemudian akan mendorong semangat bekerja serta dapat meningkatkan produktivitas kerja (Winarto et al., 2022). Berikut merupakan jumlah upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021 pada Gambar 1.4 di bawah ini:



Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat

**Gambar 1.4**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021**  
**(Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya *output* yang dihasilkan serta banyaknya permintaan barang dan jasa dari masyarakat di daerah Provinsi Jawa Barat dan luar Provinsi Jawa Barat. Besaran upah minimum di Provinsi Jawa Barat memiliki peringkat ke dua tertinggi di Pulau Jawa setelah

DKI Jakarta. Hal ini akan mendorong atau menarik para pekerja untuk bekerja di Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh dan dampak dari ketiga faktor tersebut terhadap PDRB perlu dibuktikan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang menggunakan analisis data panel diharapkan mampu membantu untuk melihat pengaruh dari keempat faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Aglomerasi industri dimana terjadi pemusatan kegiatan industri yang diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi wilayah industri dan memberikan efek positif bagi wilayah yang ada di sekitarnya seperti pada penelitian oleh Aldi Rifkyanda (2020) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara aglomerasi industri dan PDRB. Investasi di sektor industri berkontribusi untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja baru supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penelitian oleh Muhammad Safri (2021) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara investasi dan PDRB. Upah Minimum Kabupaten/kota yang merupakan penarik tenaga kerja untuk bekerja di daerah tersebut dan pendorong dalam melakukan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi seperti penelitian oleh Hari Winarto (2022) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara upah minimum dan PDRB. Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum secara parsial terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum secara parsial terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Mengetahui pengaruh aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

- a. Menambah wawasan terhadap bidang ekonomi terutama mengenai pembangunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
- b. Memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- c. Menjadi acuan dalam penelitian yang akan datang.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Peneliti
  - 1) Sebagai sarana latihan dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh di bangku perkuliahan.
  - 2) Menambah pengetahuan, pengalaman, serta pengembangan pemikiran dan wawasan yang dapat di gunakan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan, pertimbangan dan referensi dalam membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan daerah.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 27 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat diantaranya ada 18 Kabupaten dan 9 Kota. Peneliti memilih lokasi ini, karena

